

PENGARUH BELANJA DAERAH LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2019

Thoriq Abdul Hakim¹, I Made Suparta²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
thoriqhakim17@gmail.com¹, madesuparta@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of direct regional spending on economic growth in East Java Province. This study uses secondary data obtained from official websites such as BPS East Java Province, and the type of data used in this study is quantitative data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 1. Partially, personnel expenditure, goods, and services expenditure, and capital expenditure have no significant effect on economic growth with a significant value of the t-test of the employee expenditure variable of 0.337 (greater than 0.05), for a significant value of the t-test goods and services expenditure variable is 0.622 (greater than 0.05) and for the significant value of the t-test variable for capital expenditure is 0.717 (greater than 0.05). 2. Simultaneously, the effect of personnel expenditure, goods and service expenditure, and capital expenditure has no significant effect on economic growth in East Java Province, as evidenced by the significance value of the F test of 0.599 which is smaller than 0.05.

Keywords: *Personnel Expenditure, Goods and Services Expenditure, Capital Expenditure, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan intisusi nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang merujuk pada kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian daerah dengan meningkatkan secara terus-menerus pendapatan riil suatu

daerah pada laju pertumbuhan, faktor-faktor produksi, dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.

Belanja Daerah berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 terdiri atas: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja

subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tabel 1
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap
Belanja Daerah Langsung Provinsi Jawa
Timur
Tahun 2010 – 2019

No	Tahun	Belanja Daerah Langsung	Belanja Pegawai (Rp 000)	(%)
1	2010	4.336.571.471	668.598.067	15,41
2	2011	5.096.053.104	895.165.704	17,56
3	2012	5.677.971.455	1.019.269.017	17,95
4	2013	6.048.844.119	1.070.076.913	17,69
5	2014	6.306.212.284	656.587.346	10,41
6	2015	7.871.472.846	662.267.949	8,41
7	2016	7.479.239.692	562.836.333	7,52
8	2017	9.459.230.941	594.491.325	6,28
9	2018	9.565.136.562	822.302.724	8,59
10	2019	10.919.149.235	909.168.772	8,32

Sumber: BPS Surabaya

Tabel 2
Proporsi Belanja Barang dan Jasa Terhadap
Belanja Daerah Langsung Provinsi Jawa
Timur
Tahun 2010 – 2019

No	Tahun	Belanja Daerah Langsung	Belanja Barang dan Jasa (Rp 000)	(%)
1	2010	4.336.571.471	2.790.096.474	64,33
2	2011	5.096.053.104	3.155.525.486	61,92
3	2012	5.677.971.455	3.601.337.254	63,42
4	2013	6.048.844.119	3.803.016.160	62,87
5	2014	6.306.212.284	4.442.168.317	70,44
6	2015	7.871.472.846	4.950.884.825	62,89
7	2016	7.479.239.692	4.765.809.248	63,72
8	2017	9.459.230.941	5.774.683.932	61,04
9	2018	9.565.136.562	5.902.281.588	61,70
10	2019	10.919.149.235	6.867.594.229	62,89

Sumber: BPS Surabaya

Tabel 3
Proporsi Belanja Modal Terhadap Belanja
Daerah Langsung Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 – 2019

No	Tahun	Belanja Daerah Langsung	Belanja Modal (Rp 000)	(%)
1	2010	4.336.571.471	877.876.930	20,24
2	2011	5.096.053.104	1.045.361.914	20,51
3	2012	5.677.971.455	1.057.365.184	18,62
4	2013	6.048.844.119	1.175.751.046	19,43
5	2014	6.306.212.284	1.207.456.621	19,14
6	2015	7.871.472.846	2.258.320.072	28,68
7	2016	7.479.239.692	2.150.594.111	28,75
8	2017	9.459.230.941	3.090.055.684	32,66
9	2018	9.565.136.562	2.840.552.250	29,69
10	2019	10.919.149.235	3.142.386.234	28,77

Sumber: BPS Surabaya

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Belanja Daerah Langsung paling tinggi berada di tahun 2019 sebesar 10.919.149.235 dan yang paling rendah berada di tahun 2010 sebesar 4.336.571.471. Belanja daerah langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Untuk Belanja Pegawai dilihat dari segi persennya mengalami naik turun atau ketidakstabilan. Belanja Pegawai paling tinggi berada di tahun 2012 sebesar 17,9% dan paling rendah berada di tahun 2017 sebesar 6,28%. Untuk Belanja Barang dan Jasa dilihat dari segi persennya juga mengalami naik turun atau ketidakstabilan. Belanja Barang dan Jasa paling tinggi berada di tahun 2014 sebesar 70,44% dan paling rendah berada di tahun 2014 sebesar 61,04%. Untuk Belanja Modal dilihat dari segi

persennya juga mengalami naik turun atau ketidakstabilan. Belanja Modal paling tinggi berada di tahun 2017 sebesar 32,66% dan paling rendah berada di tahun 2012 sebesar 18,62%.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
2. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010- 2019?

KAJIAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah:

“Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

1. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib.
2. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan.
3. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Menurut Simon Kuznets (Jhingan, 2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output (hasil produksi ekonomi) berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan

penyesuaian ideologi.

Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (2004:429-432), yaitu:

1. Tanah dan Kekayaan Alam

Lainnya

Kekayaan alam meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut yang diperoleh. Jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang didapat, kekayaan alam dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pengembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan memungkinkan untuk menambah produksi, disamping itu sebagai akibat pendidikan latihan dan pengalaman kerja keterampilan penduduk akan bertambah tinggi, hal ini mampu meningkatkan produktifitas dan selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Selain dari pertambahan penduduk terhadap perluasan pasar.

3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang-barang modal penting artinya

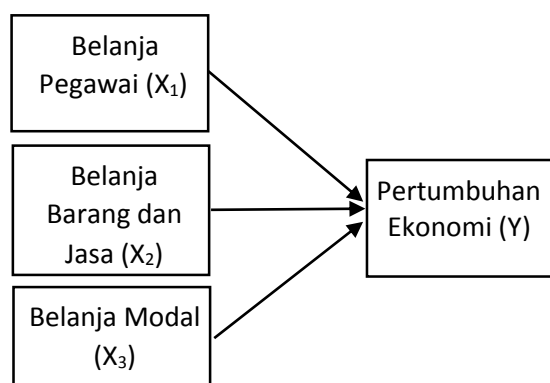
dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Di masyarakat yang kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi, begitu juga dengan kemampuan teknologi.

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Kondisi system sosial dan sikap masyarakat turut menentukan proses pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh di wilayah dengan adat istiadat tradisional yang tinggi dan menolak modernisasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, juga dimana wilayah yang sebagian besar tanahnya dimiliki oleh tuan-tuan tanah atau dimana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis. Sikap masyarakat juga dapat menentukan pertumbuhan ekonomi, misalnya sikap masyarakat yang pekerja keras, pantang menyerah berhemat dengan tujuan investasi dan sebagainya dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Pada kerangka konseptual diatas ini dijelaskan bahwa Belanja Pegawai (X1),

Belanja Barang dan Jasa (X₂), dan Belanja Modal (X₃) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

HIPOTESIS PENELITIAN

1. Belanja Pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
2. Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
3. Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010- 2019.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang kemudian diolah dan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Belanja Daerah Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang di mana peneliti tidak langsung memperoleh sumber data melainkan melalui perantara, data yang diambil dari pihak lain atau

merupakan data yang sudah diolah oleh pihak kedua. Sumber data sekunder yang digunakan adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data sekunder.

Cara Pengolahan Data dan Teknik Pengujian Hipotesis

Analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Teknik Pengujian Hipotesis yang dilakukan peneliti untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel independen secara sama – sama (simultan) dengan variabel dependen maka perlu digunakan uji anova atau F-test, sedangkan hubungan masing-masing variabel independen secara parsial (individu) diukur dengan menggunakan uji t statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
 Presentase Belanja Pegawai Provinsi Jawa Timur
 Tahun 2010-2019

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Pegawai terhadap Belanja Langsung (%)	Perkembangan Belanja Pegawai (%)
2010	668.598.067	15,41	27,73
2011	895.165.704	17,56	25,31
2012	1.019.269.017	17,95	12,17
2013	1.070.076.913	17,69	4,74
2014	656.587.346	10,41	-62,97
2015	662.267.949	8,41	0,85
2016	562.836.333	7,52	-17,66
2017	594.491.325	6,28	5,32
2018	822.302.724	8,59	27,70
2019	909.168.772	8,32	9,55

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan Belanja Pegawai Provinsi Jawa Timur tahun 2010 naik sebesar 27,73% dari belanja pegawai tahun 2009. Belanja Pegawai tahun 2011 juga mengalami kenaikan sebesar 25,31% . Belanja Pegawai tahun 2012 jugamengalami kenaikan sebesar 12,17%. Pada tahun 2013, belanja pegawai juga mengalami kenaikan sedikit 4,74%. Pada tahun 2014, belanja pegawai mengalami penurunan signifikan sebesar (-62,97%). Pada tahun 2015, belanja pegawai mengalami kenaikan lagi sebesar 0,85%. Pada tahun 2016, mengalami penurunan kembali sebesar (-17,66%). Pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 5,32%. Pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 27,70%. Di tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 9,55%.

Tabel 2
 Presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
 Tahun 2010-2019

Tahun	(%)
2010	6,68
2011	7,22
2012	7,27
2013	6,55
2014	5,86
2015	5,44
2016	5,55
2017	5,45
2018	5,50
2019	5,52

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa presentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2010- 2019 mengalami naik turun atau ketidakstabilan. Untuk pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di tahun 2011 sebesar 7,22% dan untuk pertumbuhan ekonomi paling rendah berada di tahun 2015 sebesar 5,55%.

Tabel 5
 Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.967	.444		13.453	.000
Belanja Pegawai (X1)	.011	.011	.393	1.043	.337
Belanja Barang dan Jasa (X2)	.016	.031	.195	.519	.622
Belanja Modal (X3)	-.007	.018	-.139	-.380	.717

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini di uji dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 5,967 + 0,011X_1 + 0,016X_2 - 0,007X_3 + e$$

Berdasarkan hasil model regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 5,967, artinya jika Belanja Pegawai (X1), Belanja Barang dan Jasa (X2), dan Belanja Modal (X3) nilainya adalah 0, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) nilainya adalah 5,967.
2. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Pegawai (α_1) bernilai positif yaitu sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi juga

akan meningkat sebesar 0,011 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variabel Belanja barang dan Jasa (α_2) bernilai positif yaitu sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,016 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal (α_3) yaitu sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian uji T dari SPSS 22 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,043 sedangkan t tabel sebesar 2,447 dimana t hitung $1,043 < t$ tabel 2,447 dengan nilai signifikansi untuk variabel Belanja Pegawai sebesar 0,337. Nilai signifikansi untuk variabel Belanja Pegawai lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil

pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal ini dikarenakan bahwa pengeluaran untuk honorarium/upah pegawai meningkat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian uji T dari SPSS 22 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,519 sedangkan t tabel sebesar 2,447 dimana $t \text{ hitung } 0,519 < t \text{ tabel } 2,447$ dengan nilai signifikansi untuk variabel Belanja Barang dan Jasa sebesar 0,622. Nilai signifikansi untuk variabel Belanja Barang dan Jasa lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini dikarenakan bahwa pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang sangat tinggi dan pembelian tersebut tidak efisien dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian uji T dari SPSS 22 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,380 sedangkan t tabel sebesar 2,447 dimana $t \text{ hitung } -0,380 < t \text{ tabel } 2,447$ dengan nilai signifikansi untuk variabel Belanja Modal

sebesar 0,717. Nilai signifikansi untuk Belanja Modal lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini terjadi karena masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan produksi daerah.

Tabel 6
 Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	1.169	3	.390	.599	.639 ^a
Residual	3.907	6	.651		
Total	5.077	9			

- a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)
- b. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X3), Belanja Barang dan Jasa (X2), Belanja Pegawai (X1)

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Dari hasil uji F diatas dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 0,599 lebih kecil dari F tabel sebesar 4,35 dan nilai signifikansi sebesar 0,639 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

dan Belanja Modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja daerah langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik Surabaya dan Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji T yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $1,043 < t$ tabel $2,447$ dengan nilai signifikansi untuk variabel Belanja Pegawai sebesar $0,337 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan bahwa pengeluaran untuk honorarium/upah pegawai meningkat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
2. Belanja Barang dan Jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil

Uji T yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,519 < t$ tabel $2,447$ dengan nilai signifikansi untuk variabel Belanja Barang dan Jasa sebesar $0,622 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan bahwa pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang sangat tinggi dan pembelian tersebut tidak efisien dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji T yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,380 < t$ tabel $2,447$ dengan nilai signifikansi untuk variabel Belanja Modal sebesar $0,717 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan produksi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintah*

- Provinsi 2010-2013*. Surabaya : BPS (www.bps.go.id diakses pada bulan Maret 2020).
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017*. Surabaya : BPS (www.bps.go.id diakses pada bulan Maret 2020).
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015-2018*. Surabaya: BPS (www.bps.go.id diakses pada bulan Maret 2020).
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019*. Surabaya: BPS (www.bps.go.id diakses pada bulan Maret 2020).
- Jhingan (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah D. Guritno. Edisi ke enam belas. Jakarta: Rajawali Pers 2010.
- Moch. Chamdani. (2018). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2014*. Jurnal. Fakultas Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.